

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dengan alat bukti yang minimum kekuatan pembuktiannya belum cukup untuk menentukan pelaku bersalah dalam kasus pemerkosaan anak seperti pada bukti yang diajukan dalam perkara Nomor 1/JN.Anak/2022/Mahkamah Syar'iyah. Bpd kekuatan pembuktiannya belum kuat untuk dijadikan dasar dari pertimbangan dan keyakinan hakim dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan surat untuk menentukan pelaku bersalah melakukan tindak pemerkosaan kepada korban meskipun dalam keterangan saksi ada sebagian keterangan saksi *testimonium de auditu*.

#### **B. Saran**

Bukti-bukti yang diajukan jaksa ini kekuatan pembuktiannya lemah seharusnya perkara ini tidak dapat diajukan dalam pengadilan dan berhenti pada tahap penyidikan karena bukti yang didapat kekuatannya masih lemah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Andi Hamzah Jur., 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ansorie Sabuan, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori Hukum Dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kejaksaan RI, 2019, *Modul Hukum Pembuktian*, Badiklat Kejaksaan RI, Jakarta.
- Wisnubroto Al. dan Cesar A. Munthe, 2022, *Hukum Acara Pidana Sistem, Regulasi dan Praktik*, Suluh Media, Yogyakarta.

### **Hasil Penelitian :**

- Augies Vivian Jaya, 2023, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Jarimah Perkosaan Dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MahkamahSyar'iyah.Bpd, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Stephannie Boru Situmorang, 2021, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tri Endah Panuntun, 2015, Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus

di Pengadilan Negeri Sleman), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**Jurnal :**

Adam Bastian Mardhatillah dan Ahmad Mahyani, 2019, “Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)”, *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Vol 12 No. 1 (2019), Universitas 17 Agustus Surabaya.

Fachrul Rozi, 2018, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol 1 No 2 Des 2018, Universitas Adiwangsa Jambi.

Marwan Mas, 2012, “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Yudisial*, Vol 5 No 3 (2012), Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Maykel Runtuwene, 2019, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Penyidikan Dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan”, *E-Journal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol 8 No 5 Mei 2019, Universitas Sam Ratulangi

Muhammad Helmawansyah, 2021, “Penggunaan Barang Bukti Elektronik Yang Dijadikan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No.2 (2021), Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Nitralia Prameswari, 2015, “Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol 3 No 2 (2015), Universitas Sebelas Maret.

Nur Fitriani, 2019, “Tinjauan Yuridis Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana”, *Jurnal Legalitas*, Vol 12 No 1 (2019), Universitas Negeri Gorontalo.

Waty Suwarty Haryono dan Bhetner Hatta Pritz, 2016, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan”, *Jurnal LEX Certa*, Vol 1 No 1 (2016), Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Yosef Wahyu Sucia, 2021, “Transformasi Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol 9 No 4 Nov 2021, Universitas Mataram.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6792. Sekretariat Negara. Jakarta.

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7. Sekretariat Daerah. Aceh.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Daerah. Aceh.